

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Hubungan Internasional merupakan ilmu yang ada sejak lama dan selama perjalanannya, ilmu ini terus berkembang dan mengalami pembaharuan yang menyesuaikan dengan zaman yang bergerak semakin maju. Penting adanya keterkaitan ilmu Hubungan Internasional dengan disiplin-disiplin beberapa ilmu lainnya seperti politik, ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, budaya, dan bahkan geografis suatu negara. Tidak kalah banyak dengan kajian yang ada pada ilmu ini. Hubungan Internasional melalui sebuah organisasi yang berskala global.

Sebuah fenomenal social yang tidak terbatas dalam satu negara atau hubungan negara dengan negara lain, operasi internasional, perusahaan internasional, gerakan agama, dan dampak abstraksi seperti ekonomi internasional yang termasuk dalam cakupan hubungan internasional. Sebagai salah satu ruang lingkup dalam hubungan internasional, organisasi internasional memiliki peranan penting dalam pengembangan dan organisasi internasional bisa menjadi salah satu media kerjasama antar negara ataupun individu yang berada di negara berbeda.

Karena Hubungan internasional modern terdiri berbagai elemen yang saling terkait secara kompleks, perlu berdiri dengan pandangan luas dalam

menguraikan masalah yang saling berkaitan dengan kompleks ini. Hubungan internasional adalah memiliki sebutan lain hubungan antar bangsa yang didasari interaksi, relasi, dan komunikasi. Hubungan internasional adalah berlangsung sangat dinamis, berkembang sesuai perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi antar bangsa. Hubungan Internasional adalah sebagai subjek yang terutama memperhatikan sebuah hubungan politik antar bangsa (Dr.Hilman Adil Cleland).

Pada masa pasca Perang Dingin, Joshua Goldstein (1996) mendefinisikan hubungan internasional adalah sebagai disiplin ilmu yang menjadi bagian dari ilmu politik, tepatnya internasional. Ilmu ini mempelajari tentang keputusan-keputusan pemerintah menyangkut tindakan mereka terhadap pemerintah lainnya. Hubungan internasional adalah studi tentang Politik Internasional, yakni hubungan politik antar bangsa dalam hal peperangan, diplomasi, hubungan perdagangan, aliansi, partisipasi dalam organisasi internasional, pertukaran budaya dan seterusnya. Hubungan internasional adalah suatu kumpulan dari cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memiliki suatu masalah internasional (Umar Suryadi Bakri).

Dalam Hubungan Internasional pun ada banyak interaksi negara dan masyarakat internasional (Darmayadi 2015:22). Sedangkan menurut K.J Holsti, istilah Hubungan Internasional senantiasa berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat-masyarakat negara, baik itu dilakukan

oleh pemerintah maupun oleh negara-negara (Sitepu 2011:19). Adapun pengertian lain tentang Hubungan Internasional adalah tentang transaksi lintas batas dari semua jenis politik, ekonomi, dan sosial, dan ilmu hubungan internasional mempelajari negoisasi perdagangan atau operasi dari institusi atau lembaga non-state. Hubungan internasional adalah sebuah ilmu yang mempelajari juga sebab dan akibat dari hubungan antar suatu negara (Perwita & Yani, 2005:4).

Kepentingan Nasional merupakan tujuan utama dari suatu negara dalam lingkup kerjasama antar negara. Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara, kepentingan nasional ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi ekonomi, politik, militer dan sosial budaya. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat internasional sebagai negara yang membangun kerjasama dari kebijakan luar negeri. Dengan demikian secara konseptual kepentingan nasional dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163) sedangkan menurut Perwita & Yani Kepentingan Nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita&Yani, 2005 :35).

Awalnya dari terbentuknya Kerjasama Pertahanan antar negara dapat ditinjau dari hasil analisa tentang hal-hal sebagai berikut: Perkiraan Ancaman

(Treat Assesment). Setiap negara akan mengantisipasi akan adanya potensi tentang munculnya ancaman yang vital bagi negaranya. Negara tersebut kemudian akan secara waspada membuat kesimpulan apakah ancaman tersebut dapat diatasi sendiri atau meminta bantuan dari negara lain. Maka dari itu, kemudian negara tersebut akan mempertimbangkan potensi yang mereka miliki. Menyadari adanya interdependensi atau saling ketergantungan tersebut, maka suatu negara akan berupaya untuk menjalin kerjasama dengan negara lain (Simamora, 2013:50).

Kerjasama Pertahanan atau *Defence Cooperation*. Apabila dilihat dari bentuknya kerjasama pertahanan juga merupakan kerjasama yang dilakukan secara formal (*formal cooperation*) antara dua atau lebih negara. Karena untuk melakukan kerjasama tersebut menggunakan suatu treaty atau agreement atau yang biasa dikenal dengan MoU, baik yang mengikat (*binding*) ataupun yang tidak mengikat (*non-binding*), yaitu dengan sebutan perjanjian kerjasama pertahanan atau *defence cooperation* dilakukan berdasarkan kepentingan nasional dari masing-masing negara.

Kerjasama pertahanan harus memiliki tujuan yang jelas, karena kerjasama pertahanan sangat vital apabila memiliki arti ganda dan tidak memiliki arah yang dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh para pihak seperti Terorisme, Cyber Crime, dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia adalah mitra terdekat Indonesia baik dalam hal Kerjasama Internasional, Ekspor dan Import, ataupun

bidang pertahanan dan keamanan. Australia adalah tetangga Indonesia yang terdekat. Hubungan Diplomatik antara kedua negara ini mempunyai sejarah panjang. Dalam perjalanannya, hubungan antara Indonesia dan Australia tidak terlepas dari konflik. Ketika terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Australia turun ikut campur dengan berpihak ke Malaysia. Militer Malaysia yang ketika itu mendukung Malaysia, terlibat pertempuran dengan militer Indonesia di Borneo (Kalimantan). Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangannya hubungan Indonesia dengan Australia. Namun, ketika terjadinya pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999, hubungan kembali memanas. Indonesia menganggap bahwa lepasnya Timor Timur dikala akibat campur tangan Pemerintah Australia. Saat ini, hubungan kedua negara jadi sedikit tegang dari sikap sebagian Kongres Australia yang membiarkan masuknya pelarian dari gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) ke wilayah Australia. Selain itu, isu mengenai pencarian suaka dan penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap biro-biro hukum di Indonesia mulai mempertanyakan hubungan teman atau lawan dengan Australia<sup>1</sup>.

Hubungan Bilateral atau hubungan kedua negara akan menghasilkan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian internasional. Perjanjian tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan dukungan dari negara lain. Banyak manfaat bagi kedua negara yang telah melakukan perjanjian internasional.

Terdapat 5 aspek yang menjadi fokus dalam perjanjian Internasional. Salah satunya ialah aspek keamanan dan pertahanan. Manfaat dari aspek keamanan dan pertahanan untuk menghindar adanya konflik dengan negara lain dan terbukanya kesepakatan untuk ikut serta dalam proses perwujudan perdamaian dunia.

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org>

Indonesia melakukan perjanjian internasional dalam aspek keamanan atau *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* terhadap Australia.

Pada tahun 2009. Pihak Australia menyadap presiden dan ibu negara serta para pejabat yang mempengaruhi kebijakan yang telah dibuat oleh Presiden. Ibu negara yang menjadi target sebab kebijakan yang dibuat presiden sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Disaat ditanya oleh pemerintah Indonesia. Perdana menteri Australia Abbot mengaku hanya mengumpulkan informasi yang dilakukan Australia. Australia sendiri ketakutan atas respon cepat penyadapan yang dilakukannya terhadap Indonesia. Indonesia merupakan negara pemberani. Karena keberaniannya melawan negara maju sering melakukan *Spionasme* yaitu Australia dan Amerika Serikat.

Hal tersebut yang menjadi pertimbangan bagi Indonesia, untuk menerima ajakan Perdamaian Australia. Menlu Indonesia Marry Natalegawa memberi syarat dalam perdamaian kepada Australia untuk membuat perjanjian Internasional antara Indonesia dan Australia agar tidak terjadi lagi skandal yang sama di tahun mendatang. Walaupun Indonesia dan Australia sudah lama melakukan hubungan Internasional. Pihak Australia tidak memberikan kepercayaan terhadap Indonesia karena sistem pemerintahan yang buruk dan banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Pada tanggal 28 Agustus 2014, merupakan hari yang bersejarah bagi kedua negara. perjanjian Internasional dalam aspek keamanan atau *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* telah ditandatangani oleh kedua pihak. Penandatanganan dilakukan oleh Menlu Marry Natalegawa dan Menlu Australia Julie Bishop di Bali yang disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Code of Conduct* mengatur antara lain Nota Kesepahaman bersama (MoU) mengenai tata perilaku dalam pelaksanaan perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang kerangka kerjasama keamanan.

Pertama, Indonesia dan Australia tidak akan menggunakan setiap intelijen mereka termasuk kapasitas penyadapan atau sumber daya lainnya dengan cara – cara yang dapat merugikan kepentingan dari kedua pihak. Kedua, Indonesia dan Australia akan mendorong kerjasama intelijen antara lembaga-lembaga dan badan-badan yang relevan, sesuai dengan hukum dan peraturan Internasional masing-masing. Pemulihan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia bergantung pada perjanjian tersebut. Masing-masing negara harus menjaga perjanjian tersebut demi mempertahankan kemerdekaan yang telah mereka raih. Ini merupakan kesepakatan yang sangat penting bagi kedua negara yang memiliki hubungan mitra strategis. Tentunya kita dapat melihat tindakan-tindakan yang terjadi dimasa lalu. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan hal serupa tidak akan terulang kembali dimasa mendatang.

Seperti halnya perjanjian yang diatas. Bahwa, Indonesia dan Australia memiliki tujuan agar masyarakatnya bisa hidup lebih nyaman tanpa gangguan dari negara lain seperti halnya *Spionase*. Etika dalam inteligensi telah diatur dalam perjanjian tersebut. Begitu pentingnya peranan negara lain terhadap negara Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negative, sangat mempengaruhi jalannya negara Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.<sup>2</sup>

Di Era Pemerintahan Presiden Jokowi, hubungan Diplomatik Indonesia dan Australia semakin erat. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malcolm Turnbull berkomitmen untuk meningkatkan hubungan kedua negara melalui peningkatan “*People to people contract*” dengan aspek kerjasama. Kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama disejumlah sektor, pertama, Sektor pariwisata, Kedua, Sektor Pendidikan, Ketiga, Sektor Ekonomi, kedua negara sepakat menyelesaikan masalah ekonomi antara Indonesia dan Australia di *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA)*. Pada akhir 2017. Keempat disektor

---

<sup>2</sup> Dikutip dari <https://www.kompasiana.com>

perdagangan dan kelima, dibidang politik termasuk bidang pemberantasan Terorisme dan Trans-National Organize Crime.<sup>3</sup>

Pertimbangan Geopolitik antara Indonesia dan Australia selalu terjadi Konflik Panas – Dingin. Pada periode lainnya hubungan tersebut berubah menjadi ketegangan, saling curiga dan kurang bersahabat. Tidak jarang karakter hubungan kedua negara ini berubah sangat cepat dalam interval waktu yang sangat pendek.

Hubungan Indonesia dan Australia mulai mengalami ketegangan. Ketegangan meningkat disaat Indonesia memasukan Timor Timur menjadi provinsi ke-27 tahun 1967, sejak itu hingga kini hubungan Diplomatik Indonesia dan Australia dinamikanya sangat fluktuatif. Kedua negara terkadang sangat akrab di era pemerintahan kepemimpinan Presiden Soeharto dan PM Paul Keating tahun 1992 – 1995. Namun, Sering pula cepat menegang di era kepemimpinan PM John Howard dan Presiden B.J Habibie atau di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Tony Abbot tahun 2013-2014. Kedua negara telah diwarnai dan didominasi oleh aspek *Enimity* (permusuhan) ketimbang *Amity* (kerjasama). *The Pattern of amity and eminty* ini menjadi faktor penting yang menyebabkan perbedaaan sikap dan perilaku kebijakan luar negeri. Suatu negara terhadap negara lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi Dinamika hubungan keduanya dari waktu ke waktu.<sup>4</sup>

Kebijakan politik Australia terhadap Indonesia pada masa pemerintahan John Howard dan President B.J. Habibie. Pada tahun 1999. Saat John Howard memerintah Banyak yang berubah dari hubungan kedua negara.<sup>5</sup> tentu saja Indonesia merupakan negara yang sangat berbeda dari tahun ke tahun. Indonesia-Australia sejak dulu adalah negara yang sangat berbeda, tapi juga merupakan

---

<sup>3</sup> Dikutip dari Koran Kompas.com.Minggu,26 Februari 2017

<sup>4</sup> Dikutip dari Jurnal Siti Mutiah Setyawati dan Dafri Agussalim “*Security Complex* Indo-Australia dan pengaruh terhadap Dinamika Hubungan Kedua negara.

<sup>5</sup> Kompas 24 Februari 2000,Hlm.7



sebuah fakta bahwa keduanya tetap berdampingan selamanya. Sehingga hubungan kedua negara selalu penting<sup>6</sup>.

Pemerintah Australia selalu berkomitmen untuk membuat hubungan keduanya selalu berfungsi baik. Pada saat peristiwa Bali memberikan peluang yang besar bagi kedua negara untuk bekerjasama menghadapi masalah yang dihadapi. Perdana Menteri Howard soal keberagaman Etnis dan budaya di Australia telah di tunjukan dalam berbagai pernyataan. Kontribusinya Indonesia membuat Australia negara yang kompleks dan menarik.<sup>7</sup>

Indonesia dan Australia bekerjasama dengan sangat baik. Indonesia dalam Bidang pertahanan dan keamanan yang diwujudkan dalam operasi kemanusiaan dan berbagai pelatihan dan kerjasama untuk memberantas kejahatan lintas batas. Sejak terjadi peristiwa Bom Bali I tahun 2002, Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia bekerjasama era dalam rangka indentifikasi korban bencana dan pelatihan penanggulangan terorisme. Kerjasama erat kepolisian kedua negara terlihat saat peristiwa bom lainnya dan peristiwa jatuhnya pesawat Garuda di Yogyakarta. Baru-baru ini, Timor timur Identifikasi Korban Bencana POLRI dikirim ke Australia untuk membantu menangani Bencana kebakaran hutan terbesar diabad Victoria yang menelan lebih dari dua ratus korban termasuk dua warga Indonesia. Pemerintah dan rakyat Australia sangat menghargai tindakan cepat Indonesia untuk membantu yang menunjukkan kedalaman persahabatan antara Indonesia dan Australia<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Alexander Downer. "Australia's Foreigns Policy: Advancing Our National Interest.<http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/1988/jssc5mar98.html>. Diakses pada 14 Mei 2011.

<sup>7</sup> D.M.Snow. *Cases in Internasional Relations: Portraits of the Future*. NewYork " Longman, 2003.Hlm.162

<sup>8</sup> Z.A Makarim. *Hari-hari Terakhir Timor-Timur*. Sebuah Kesaksian.Jakarta: Sportif Media Informasiindo.20013. hlm. 19-24.

Dibidang Keamanan, Indonesia dan Australia berkomitmen memperkuat Kerjasama pertahanan yang berlandaskan prinsip-prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Komitmen itu dilakukan setelah Menhan RI Ryamizard bertemu Menhan Australia Christopher Pyll – sela pertemuan IMF di Bali, dalam keterangan Pers disebutkan. Kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama Indonesia dan Australia. Hal itu menjadi sarana yang baik dalam mendukung kepentingan bersama kedua negara. Berbagai bidang yang perlu ditingkatkan mencakup keamanan maritime, Keamanan Cyber, dan keamanan pertahanan. Dialog bilateral diharapkan dapat meningkatkan hubungan kedua negara serta memberikan kontribusi bagi Stabilitas dan keamanan regional dan global. Hal ini penting dalam upaya bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan dikawasan Samudra Hindia.<sup>9</sup>

Kerjasama Keamanan dengan Indonesia, Australia menyatakan hubungan kuat dan produktif dengan Indonesia penting bagi Keamanan Nasional Australia. Australia dan Indonesia berbagai perbatasan maritime dan kepentingan sama untuk Keamanan dan Stabilitas di Asia Tenggara. Disebutkan pula bahwa kekuatan Hubungan Keamanan dengan Indonesia disbanding dengan kerangka kerjasama yang diterapkan dengan Traktat Lombok (2006), Tata Kerjasama Pertahanan (2012) dan Kesepahaman bersama bidang kerjasama Intelijen 2014. Australia dan Indonesia bekerjasama untuk mengatasi ancaman keamanan bersama. Kerjasama terutama dibidang Counter Terrorisme, Keamanan Maritim, Bantuan Kemanusiaan dan Pemulihan bencana, penjagaan perdamaian, dan Intelijen. Berubahnya politik Dunia disertai pula berubahnya situasi keamanan dunia ditandai dengan munculnya Isu-Isu Politik dan keamanan baru, seperti meningkatnya aktivitas terorisme, Maraknya ajaran Radikalisme, perampokan dan pembajakan, imigran Gelap, illegal fishing, Blackmarket, Bentuk-bentuk kejahatan tersebut disebut Trans-national Crime atau Non Tradisional Security.

---

<sup>9</sup> Dikutip dari Berita Satu: Jumat, 12 Oktober 2018.

Tingkat bahaya akan kejahatan makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan Teknologi dan Finansial.<sup>10</sup>

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, Maka Dibentuklah Lembaga Khusus Penanggulangan Di Bidang Terorisme Yaitu Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT). BNPT sendiri memiliki Pusat Pengendalian Krisis (“pusdalsis”) yaitu didalamnya merupakan gabungan antara Kesatuan Khusus seperti Densus 88 dan Kopassus dari TNI-AD, Denjaka dari TNI-AL, Detasemen Bravo 90 dari TNI-AU dan Resimen I Gegana Korps Brimob dari POLRI. Pusedalsis yang terdiri dari gabungan Satuan Khusus Elite POLRI-TNI ini ditugaskan sebagai Pasukan Penanggulangan Terror Jika terjadi aktivitas Terorisme.<sup>11</sup>

Indonesia sendiri sebagai salah satu negara dengan pengaruh Terorisme tertinggi, tentunya harus menaruh perhatian besar terhadap perkembangan paham Radikal serta Jaringan Terorisme, sebab terorisme itu merupakan kejahatan yang bersifat Transnasional serta Terorganisir dengan Kekhasan yang bersifat Klandestin<sup>12</sup>. Disamping itu kejahatan ini didukung pula oleh pendayagunaan teknologi modern dibidang komunikasi, infomatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga tidak mengherankan jika di beberapa negara telah melahirkan sel-sel baru yang menjadi embrio bagi perkembangan jaringan terorisme itu sendiri. Menurut Ifran Idris, pola penyebaran radikalisme dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti (a) Media massa: yang meliputi internet, radio, buku, majalah dan pamphlet; (b) Komunikasi langsung dengan bentuk dakwah, diskusi, dan pertemanan; (c) Hubungan Keluarga dengan bentuk

---

<sup>10</sup> Dikutip dari Repository.unpas.ac.id

<sup>11</sup> “Latih Kesiapan Antiteror di Gulkonsis VI” *Remigius Septian, COMMANDO* edisi 6 vol. XII 2016 hlm: 28, 2016

<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan Klandestin adalah Organisasi terorisme yang memiliki sifat Rahasia, diam-diam atau melakukan gerakan bawah tanah.

pernikahan, kekerabatan, dan keluarga inti: (d)Lembaga pendidikan, baik di sekolah, pesantren, maupun perguruan tinggi. Diantara pola penyebaran Radikalisme tersebut, teknik penyebaran melalui Media Internet lah yang paling sering digunakan.<sup>13</sup>

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen.Pol. Boy Rafli,MH. juga mengingatkan bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kelompok baru anggota teroris tidak perlu lagi keluar negeri untuk mengenyam pendidikan di Afghanistan, akan tetapi diasah secara intensif melalui media sosial dengan memanfaatkan internet<sup>14</sup>. Melalui konektivitas internet, berbagai konten radikal seperti hakikat jihad dengan mengangkat senjata, tutorial pembuatan bom, tutorial tata cara penggunaan senjata, serta penyerangan diunggah diberbagai media sosial dan disebar secara masif, terstruktur dan sistematis.

Disamping itu, terorisme merupakan suatu kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang target aparat negara, penduduk sipil, secara acak serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integrasi teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional<sup>15</sup>. Pasca Kasus Penyerangan 09-11 di Gedung World Trade Center, AS. Australia juga menjadi target sasaran para teroris karena asumsi mereka Australia merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat. Di Indonesia pun

---

<sup>13</sup> Irfan Idris, M, A, et. all, 2017, Analisis Isu Kontemporer Modul Pelatihan Dasar Calon CPNS, Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta, Hal.68-69.

<sup>14</sup><https://nasional.kompas.com/read/2016/09/06/07192151/kepala.bnpt.ungkap.pola.rekrutmen.teroris.berubah.karena.internet> diakses, Sabtu, 6 Juli 2019

<sup>15</sup> Lihat penjelasan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU

terjadi beberapa serangan seperti, Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002, Ledakan Bom di Hotel JW Marriot pada Agustus 2013, Bom Bali II tanggal 5 Oktober 2005, Bom Bunuh Diri didepan Kedutaan Besar Australia tahun 2004 yang cukup menelan korban jiwa warga Australia.

Dengan Rentetan beberapa Kasus di atas, sebagai gambaran bahwa Ideologi Radikalisme dan Jaringan Terorisme di Indonesia Memiliki Jaringan Luas dan Kuat untuk membahayakan Kedaulatan, Keamanan, serta Kedamaian di Indonesia. Bagi BNPT sendiri. Kasus – kasus diatas sebagai acuan atau laporan dalam penanggulangan tindak pidana kasus terorisme itu sendiri. Sebab di Indonesia sendiri memiliki kelompok” untuk menyebarkan teror dan ajaran radikalnya kepada masyarakat. Menurut BNPT terdapat Tiga kelompok yang menjadi penyebab teror dan ajaran radikalnya di Indonesia, yakni:

Kelompok Jemaah Anshorut Daulah (JAD), dengan Ideologi Radikal nya serta Ketuanya Aman Abdul Rahman, kelompok ini memiliki tokoh di Suriah yakni Abdu Jandal. Kelompok kedua yaitu Bahrn Naim, kelompok ini berbeda dengan JAD sebab memiliki jaringan tersendiri, seperti tim Hisbah di Solo dan kelompok HTI yang bergerak dengan Bahrn Naim. Dan kelompok ketiga adalah Bahrn Syah, ia tokoh penting kelompok ISIS di Indonesia, pada tahun 2017, namun kelompok ini sedikit pengikut. BNPT dan BIN menyebut baha Bahrn Syah semacam penghubung kelompok Mujahidin di Indonesia dengan Filipina<sup>16</sup>. Tidak hanya ke tiga kelompok diatas terdapat satu kelompok paling terkenal di Indonesia yakni di Wilayah Sulawesi Tengah memiliki kelompok Radikal yang menyebar teror yaitu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau disingkat (MIT) yang di Pimpin oleh Santoso, kemudian di ambil alih oleh Ali Kalora. Pada tahun 2014, MIT telah menyatakan sumpah setia kepada Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Kelompok ini secara umum melakukan operasi di daerah Sulawesi Tengah, dan sejak di Pimpin oleh Santoso sudah banyak Rentetan Kasus

---

<sup>16</sup> Data BNPT dan BIN, Jakarta Pusat 26 Juni 2018

Penyerangan dari tahun 2011 hingga 2020. BNPT, TNI, POLRI bekerjasama dalam penumpasan kelompok teroris tersebut dengan Operasi Tinombala tahun 2016 dan diganti dengan Operasi Madago Raya tahun 2021. Dengan berhasil nya membunuh Dua Pemimpin Kelompok MIT di Poso, Sulawesi Tengah.

Perkembangan Islam di Indonesia selalu menjadi perhatian Pemerintah Australia, secara umum, Australia menilai Islam di Indonesia sebagai Islam Moderat. Namun, dari waktu ke waktu, selalu ada kekhawatiran terhadap gejala meningkatnya intoleransi dan radikalisasi di Indonesia. Bagi Australia, Radikalisme di Indonesia dianggap memiliki dampak keamanan yang nyata baik langsung maupun tak langsung. Trauma akibat Kasus Bom Bali I dan Bom Bali II Tahun 2002 dan 2005. Yang merenggut banyak korban jiwa masih melekat kuat dibenak Warga Australia. Menurut Data BNPT dan BIN sendiri Sekitar (150 warga) Australia telah bergabung dengan Organisasi Terorisme ISIS dan beberapa aksi terorisme juga terjadi di Australia meskipun skala kecil.

Kekhawatiran mengenai ancaman Radikalisme dan Terorisme ini membuat kerjasama penanggulangan terorisme menjadi salah satu agenda prioritas untuk pemerintah Indonesia bersama kepolisian Republik Indonesia/POLRI, BNPT dan BIN bersama Kepolisian Australia/Australian Federal Police bekerjasama dalam memerangi dan penanggulangan terorisme di wilayah Asia Tenggara.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dengan mengacu pada hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

### **“Program Kerjasama Keamanan Indonesia – Australia Terhadap Keberadaan BNPT di Indonesia”**

---

<sup>17</sup> Dikutip dari Kumparan : 25 Maret 2018

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas untuk memudahkan dalam menganalisa masalah, penyusun mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program kerjasama keamanan Indonesia-Australia dalam membedayakan BNPT di Indonesia.
2. Bagaimana menindak lanjuti keberadaan BNPT secara fungsional melalui program kerjasama keamanan Indonesia – Australia.
3. Bagaimana menata ulang tindakan dan strategi BNPT korelasinya dengan program kerjasama keamanan Indonesia – Australia.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis perlu membuat batasan dalam penelitian agar pembatasan dalam penelitian ini lebih berfokus pada Kerjasama Pemerintah Indonesia, BNPT dan Australia dalam menanggulangi Gerakan Radikal dan Ancaman Teroris. Penulis membuat pembatasan masalah yang memfokuskan pada: **“Mengevaluasi Sikap dan Keberadaan BNPT di Indonesia ”**.

## 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah, untuk memudahkan penyusun dalam melakukan pembahasan penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

**“Bagaimana Strategi dan Sikap BNPT Menindak Lanjuti Program Kerjasama Keamanan Indonesia – Australia .”**

## **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, penulis memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai dalam tulisan ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Hubungan Diplomatik Keamanan Indonesia – Australia
2. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dan BNPT bersama Pemerintah Australia dalam penanggulangan Gerakan Radikal dan Ancaman Teroris di Indonesia
3. Untuk mengetahui Strategi dan langkah – langkah Teroris dalam menyebarkan ajaran Radikal serta mengetahui Ideologinya di Indonesia.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh dan menambah Ilmu Pengetahuan baik secara teoritis maupun raktis bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional ataupun Ilmu Anti – Teror Terorisme dan menambah kajian Ilmu Hubungan Internasional Khususnya mengenai Peranan Kerjasama Keamanan Indonesia – Australia terhadap keberadaan BNPT di Indonesia.
- b. Untuk memberi Referensi atau masukan bagi Pemerintah Indonesia.
- c. Untuk memenuhi Salah Satu Syarat dalam menempuh Ujian Strata Satu (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.